



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK BIDANG PARIWISATA  
KOMISI X DPR RI  
PADA MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2020-2021  
KE KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH  
TANGGAL 4 s.d. 6 MEI 2021**

**I. PENDAHULUAN**

Dampak pandemi *Covid-19* terhadap pekerja pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sangat luar biasa. Menparekraf/Baparekraf RI menyampaikan bahwa dampak tersebut dirasakan oleh 34 juta orang Indonesia yang bergantung pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dari total tersebut sebanyak 2 juta orang kehilangan pekerjaan. Pemerintah Indonesia sudah mulai mensosialisasikan kebijakan *new normal*, yaitu kebijakan yang membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial dan kegiatan publik secara terbatas dengan menggunakan standar kesehatan. Dengan kondisi ini, Komisi X DPR RI pada tanggal 6 Mei 2021 menyimpulkan untuk melakukan kunjungan kerja bidang pariwisata ke Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Kabupaten Bayuwangi Jawa Timur, dan Kabupaten Pandeglang Banten.

**A. Dasar Kunjungan Kerja**

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
2. UU No. 42 Tahun 2014 Jo. UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
3. UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata;
4. UU No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan;
5. UU No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif;
6. Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020, tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019*;
7. Perppu No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
8. PP No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
9. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib; dan
10. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 6 Mei 2021.

**B. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kunjungan meliputi kajian atas kebijakan dan strategi Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dalam proses pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif yang disebabkan pandemi *Covid-19*.

### C. Tim Kunjungan Kerja

Susunan tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pariwisata Komisi X DPR RI ke Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti, S.E., M.M. (FPDIP) didampingi oleh Pejabat Kemenparekraf/Baparekraf RI yaitu Rizky Handayani selaku Deputy Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan dan Sumarni selaku Sekretaris Deputy Bidang Pemasaran. Tim didampingi juga oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, serta wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu.

### D. Kegiatan

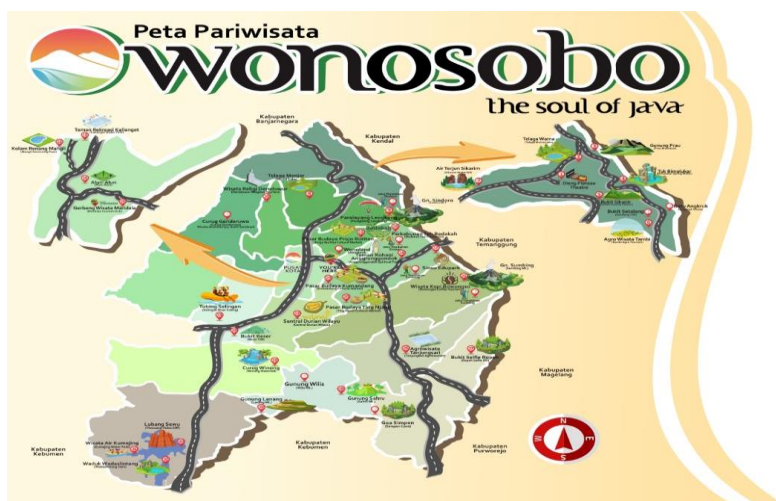
Kegiatan selama kunjungan kerja spesifik di Kabupaten Wonosobo yaitu:

1. Pertemuan dengan Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat yang dihadiri oleh:
  - a. Wakil Bupati Wonosobo, Muhammad Albar.
  - b. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo.
  - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, Drs. One Andang Wardoyo.
  - d. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Provinsi Jawa Tengah.
  - e. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, Agus Wibowo.
  - f. Kapolres Wonosobo, Komandan Kodim 0707 Wonosobo, dan Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo.
  - g. Organisasi Kepariwisataan di Kabupaten Wonosobo yang tergabung dalam *Oemah Wisata*.
  - h. Para Pemangku Kepentingan Bidang Pariwisata di Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah.
2. Kunjungan ke Taman Geopark Dieng Wonosobo.

## II. LAPORAN

### A. Identifikasi Data Wisata dan Ekonomi Kreatif Wonosobo

1. Peta Wisata Kabupaten Wonosobo dengan *tagline* “*Wonosobo the Soul of Java*”, sebagai berikut:



2. Kabupaten Wonosobo memiliki 54 lokus pariwisata dan ekonomi kreatif. Destinasi Wisata milik Pemerintah Daerah ada 8 Daya Tarik Wisata, yang bertiket 4 Daya Tarik Wisata, yaitu (1) Wadaslintang, (2) Gardu pandang,

(3) Menjer, (4) Taman Syailendra, (5) Kalianget, (6) Tuk Bimolukar, (7) DPT, (8) Mangli. Di Lahan Perhutani/Lahan Negara, ada di Kedu Utara, terdapat sejumlah 18 Daya Tarik Wisata, Kedu Selatan sejumlah 12 Daya Tarik Wisata, sehingga total 30 Daya Tarik Wisata. Daya Tarik Wisata Perusahaan adalah Tirta, Wonoland, dan Sindoro Sumbing Park.

3. Dampak *Covid-19* Sektor Pariwisata dialami oleh sekitar 843 usaha pariwisata, 400 pelaku di industri ekonomi kreatif dan 541 pelaku seni dan budaya masyarakat. Angka kunjungan wisatawan mengalami penurunan sebesar 57,2% pada tahun 2020, tahun 2019 wisatawan yang berkunjung sejumlah 1.670.140 orang, dan tahun 2020 wisatawan yang berkunjung sejumlah 808.193 orang.
4. Pemkab Wonosobo komitmen mengatasi pandemi *Covid-19* maupun dampaknya. Pada tahun 2020, Pemkab Wonosobo menyiapkan skema pengalihan anggaran belanja daerah sejumlah Rp.35,8 Miliar yang bersumber dari *refocusing* APBD 2020, APBDDesa, Donasi Masyarakat, BUMN, BUMD dan Dunia Usaha. Anggaran sejumlah Rp.12 Milyar digunakan untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak secara ekonomi akibat dari adanya pembatasan pergerakan sosial, termasuk pelaku industri pariwisata. Pemprov Jawa Tengah melalui program Dana Insentif Daerah memberikan bantuan pengadaan sarana dan prasarana pelaksanaan protokol kesehatan dan protokol tatanan baru *new normal* bidang pariwisata bagi 4 Desa Wisata di Kabupaten Wonosobo senilai masing-masing Rp.20 Juta.
5. Pemkab Wonosobo selalu berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Tengah, salah satunya melalui pengetatan protokol kesehatan di semua destinasi wisata di Wonosobo, sesuai dengan arahan Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 28 Juni 2020. Pemkab berharap bahwa jumlah kedatangan wisatawan yang berkunjung ke Wonosobo akan bertambah seiring dengan meningkatnya rasa aman dari potensi penularan *Covid-19* bagi wisatawan sekaligus sebagai peningkatan citra positif pariwisata Wonosobo.
6. Anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pemulihan pariwisata di Kabupaten Wonosobo melalui APBD yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada tahun anggaran 2020 sejumlah Rp.394.000.000,- guna penanganan dampak *Covid-19* melalui fasilitasi bagi usaha pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo mengalokasikan melalui APBD TA 2020 berupa bantuan sarana dan prasarana pendukung protokol kesehatan *Covid-19* yang berupa APD lengkap kepada 28 Desa Wisata, 7 Destinasi Wisata dan 30 Komunitas seni budaya Wonosobo. Khusus untuk destinasi wisata yang dikelola oleh Pemkab Wonosobo telah dilakukan belanja sarana dan prasarana protokol kesehatan dan protokol tatanan baru *new normal* bidang pariwisata.
7. Beberapa skema insentif yang dilakukan dalam menanggulangi dampak ekonomi pandemi *Covid-19* antara lain melalui penyelenggaraan program Bantuan Tak Terduga (BTT) padat karya infrastruktur. Program BTT padat karya infrastruktur, bertujuan memberikan tambahan penghasilan masyarakat, meningkatkan daya beli. Upaya lainnya adalah melalui

program JPS dengan mengalokasikan Rp.12 Milyar untuk digunakan bagi masyarakat terdampak, yang diwujudkan dalam bentuk paket bantuan bahan pokok (sembako). Sejumlah 788 paket bantuan sembako dikhususkan untuk para pelaku wisata terdampak.

8. Bagi para pelaku ekonomi kreatif, telah diadakan lomba foto peduli ekonomi kreatif Wonosobo terdampak *Covid-19* guna meningkatkan *awareness* dan kepedulian masyarakat, yang dibarengi dengan fasilitasi bantuan akses pasar produk ekonomi kreatif melalui pasar *online* Wonosobo dan *pasarrun.com*.
9. Sesuai arahan dari Kemenparekraf/Baparekraf RI, seluruh objek wisata diupayakan untuk menerapkan protokol kesehatan berbasis CHSE yang salah satunya dilakukan melalui pelatihan khusus dan peningkatan kapasitas pengelola destinasi wisata dan pasar digital mengenai penerapan protokol kesehatan. Upaya lainnya adalah melalui penyediaan buku saku protokol tatanan baru sebagai panduan penyelenggaraan layanan pariwisata yang aman dan nyaman, yang didukung dengan konten multimedia (video) petunjuk berwisata aman di Wonosobo.
10. Pelibatan organisasi pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menangani dampak pandemi *Covid-19* di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif seperti HPI, Forum komunikasi Pokdarwis, Badan Promosi Pariwisata Daerah *Oemah Wisata* maupun komunitas kreatif Wonosobo yang merupakan mitra tetap, dilakukan dengan mempromosikan dan mengedukasi protokol kesehatan dan protokol tatanan baru khususnya berwisata aman di Wonosobo.
11. Pelibatan komunitas ekonomi kreatif dilakukan melalui antara lain; (1) penyusunan protokol kesehatan adaptasi kebiasaan baru di sektor ekonomi kreatif (penyelenggaraan seni pertunjukan, penyelenggaraan even, produksi karya ekonomi kreatif); (2) pelibatan dalam penyusunan media sosialisasi dan sosialisasi di masyarakat tentang adaptasi kebiasaan baru untuk penyelenggaraan kegiatan ekonomi kreatif pelibatan dalam even ekonomi kreatif di masa pandemi (pameran lukisan virtual, lomba foto grafik geliat industri ekonomi kreatif di masa pandemi, lomba lukis tong sampah tema peduli penanganan *Covid-19*, dan (3) pelibatan dalam *update* data ekonomi kreatif terdampak *Covid-19*).
12. Diskusi-diskusi yang dilakukan dengan komunitas ekonomi kreatif diantaranya: (1) mencari ruang usaha dan strategi baru salah satunya memasarkan produk secara *online*; (2) bersinergi membangun jaringan pasar bersama, misalnya komunitas *jeep* dengan destinasi serta kuliner, atau dengan pelaku tanaman hias yang berhubungan dengan wisata; (3) promosi tempat wisata melalui medsos dengan menerapkan prokes berbasis CHSE.

## **B. Data Wisata Dieng Geoprak Wonosobo**

13. Wisata Dieng Poros Nasional telah dikembangkan sebagai daerah wisata penyangga dari destinasi wisata super-prioritas Borobudur. Dieng merupakan tujuan wisata terusan nasional dari Borobudur, Prambanan, Solo, Jogjakarta, Pangandaran. Telah dibangun Jalan alternatif menuju

Dieng, dari Pantura melewati Pekalongan, Batang menuju Dieng. Saat ini telah dibangun *home stay/hotel* serta wisata-wisata penunjang.



14. Kawasan Dieng Geopark (Taman Bumi) bertujuan mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan, mengembangkan suatu kawasan yang memiliki potensi warisan geologi, keanekaragaman hayati, dan budaya, serta sebagai upaya konservasi, edukasi dan pengembangan masyarakat. Tahapan yang disiapkan adalah (1) pembentukan Tim Efektif Pembangunan Pengembangan Geopark; dan (2) pengembangan Geopark yang dilakukan melalui tahapan:
  - a. penetapan Warisan Geologi (*geo-heritage*);
  - b. perencanaan Geopark;
  - c. penetapan status Geopark; dan
  - d. pengelolaan Geopark.

### C. Diskusi dan Pembahasan

Pertemuan yang dipimpin oleh Sekeretaris Daerah Kabupaten Wonosobo Drs. One Andang Wardoyo mendiskusikan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

1. Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, menyampaikan sambutan antara lain sebagai berikut:
  - a. Dampak *Covid-19* di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Wonosobo sangat luar biasa. Hal ini dialami oleh sekitar 843 usaha pariwisata, sekitar 400 pelaku di industri ekonomi kreatif dan sekitar 541 pelaku seni dan budaya masyarakat. Pariwisata dan ekonomi kreatif tetap menjadi prioritas dan telah masuk RPJMD. Penanganan wabah *Covid-19* tetap menjadi prioritas untuk ditangani, agar mendukung upaya tersebut.
  - b. Di Dieng banyak *home stay* yang bentuknya bukan hotel, karena Pemkab Wonosobo ingin mendorong agar masyarakat berperan memanfaatkan potensi yang ada, khususnya di sekitar Dieng. Pembinaan terus dilakukan kepada para pelaku pariwisata, pelaku kuliner, juga pelaku *home-stay* yang ada di sekitar destinasi. Ini bagian dari komitmen kami untuk memajukan pariwisata.
  - c. Pada sarasehan membahas aksesibilitas dari Borobudur menuju ke Dieng, kami harap bisa ditingkatkan menjadi jalan nasional, mengingat

Dieng adalah wisata penyangga super-prioritas Borobudur. Aksesibilitas sangat penting, guna mendukung bukan hanya pariwisata, tetapi juga perekonomian Jawa Tengah.

2. Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, Agus Wibowo, memaparkan makalah sebagaimana angka II. A. tersebut, yang intinya antara lain:
  - a. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif merosot tajam akibat *Covid-19* pariwisata merosot, sehingga diupayakan skema insentif yang diberikan kepada pelaku parekraf, bantuan presiden untuk UMKM, pelatihan peningkatan kapasitas UMKM. Selain itu, promosi pariwisata dilakukan diantaranya dengan membuat aplikasi “jelajah Wonosobo” yang bisa diunduh di *play store*.
  - b. Pembangunan daerah wisata Dieng sebagai poros nasional, ke depan, diharapkan dapat “disentuh” oleh Pemerintah Pusat, karena pembangunan di kawasan ini terdapat irisan dengan berbagai sektor.
3. Sekda Kabupaten Wonosobo Drs. One Andang Wardoyo, menambahkan bahwa:
  - a. Kabupaten Wonosobo sudah punya komunitas ekonomi kreatif “mandala wisata” yang terkoleksi di Galeri Gerbang Mandala Wisata, dan perlu keseriusan dan dukungan dari Pemerintah Pusat dalam pembinaannya. Produk-prosuk Wonosobo perlu peningkatan kapasitas Ekonomi Kreatif.
  - b. Kawasan Dieng sudah masuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sejak tahun 2019, sehingga mendapatkan DAK pariwisata sejak tahun tersebut. Gedung Syailendara di Dieng dibangun melalui DAK tahun 2019. Namun demikian, tahun 2022, Kawasan Dieng belum masuk *list* KSPN sehingga Pemerintah/Kemenparekraf-RI perlu untuk memasukkan kembali Kawasan Dieng sebagai KSPN.
  - c. Kabupaten Wonosobo berada di “Jantung Pulau Jawa”. Akses ke Wonosobo dari Semarang, Yogyakarta, Purwokerto, atau Surakarta, membutuhkan waktu yang relatif lama (jauh), sehingga sangat dibutuhkan jalan akses yang bisa mempersingkat waktu tempuh ke Dieng. Akses tersebut bisa jalan tol dan sudah ada masterplan perencanaannya, seperti akses tol dari NYIA - Dieng dengan melewati beberapa daerah. Atau aktivasi kembali rel kereta api Purwokerto-Wonosobo.
4. Pelaku Wisata Kab. Wonosobo tergabung dalam *Oemah Wisata*, Asti Meiningsih, menyampaikan beberapa masukan sebagai berikut:
  - a. Komunitas *Oemah Wisata* merupakan rumah bagi semua pelaku wisata di Wonosobo, dan terdiri dari 14 elemen pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Elemen tersebut antara lain mulai dari sopir, *guide*, dan sebagainya. Tujuannya adalah agar sama-sama bergandeng tangan bekerjasama dan mempunyai *taqline* “*maju bareng, mulyo Bareng*”.
  - b. Kami memiliki program kerja yang dijalankan bersama-sama, diantaranya peningkatan SDM, butuh pelatihan, dll. Salah satu program kami adalah *omah Bahasa*, yaitu melatih pelaku wisata dengan Bahasa yang dapat dimengerti wisatawan mancanegara. Namun demikian kami membutuhkan *support* dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat agar seluruh program kerja ini dapat berjalan. Akibat pandemi ini,



pariwisata dan ekonomi kreatif sangat mempengaruhi kedatangan wisatawan, dan merugikan kami.

- c. Salah satu yang dikembangkan di Dieng adalah wisata minat khusus, yaitu paralayang. Meskipun Dieng sudah dua kali menjadi tuan rumah *Trip of Indonesia* karena memang wilayahnya sangat sesuai dengan kriteria paralayang, namun masih terdapat kendala, antara lain:
  - wilayah sebagian besar milik Perhutani, sehingga kami perlu dibantu melakukan komunikasi dengan Perhutani untuk menggelar berbagai even paralayang.
  - kekurangan infrastruktur, khususnya jalur/akses, serta perlunya diperbaiki segera tempat untuk *take off* paralayang karena memiliki *track* yang cukup bagus.
5. Menjawab beberapa masukan tersebut, Rizky Handayani, Deputy Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf/Baparekraf RI, menyampaikan antara lain:
  - a. Dieng sudah menjadi destinasi internasional, sehingga merupakan destinasi unggulan Jawa Tengah. Dieng termasuk dalam kawasan Utama Destinasi Super Prioritas (DSP). Untuk membuka kembali Kawasan wisata ini tentu protokol CHSE wajib dilaksanakan terutama di desa-desa wisata dan UMKM yang mendukung area wisata dataran tinggi Dieng.
  - b. Dataran tinggi Dieng dengan candi-candi yang ada, masuk dalam agenda *Asian Kingdom*, Jelajah Candi, dan masuk dalam pengembangan interest wisata *heritage*, sehingga telah mendapatkan perhatian dari Pemerintah. Untuk mengembangkan wisata disini, seperti *Dieng Culture Festival*, dibutuhkan panduan pelaksanaan even untuk mendukung pemasaran ekonomi kreatif. Di era pandemi ini, tidak dibutuhkan even yang besar, tetapi *smaller in size*.
  - c. Terkait DAK, akan dikoordinasikan dengan Deputy Bidang Destinasi Pariwisata. Sebab hal ini terkait dengan posisi Dieng sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
6. Menanggapi beberapa masukan dari pemangku kepentingan Kabupaten Wonosobo, Komisi X DPR RI melalui, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti, Abdul Fikri Faqih, MY Esti Wijayati, Mujib Rohmat, Bisri Romly, dan Rano Karno (virtual), menyampaikan antara lain:
  - a. Berharap agar pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM, khususnya di Kabupaten Wonosobo, dapat lebih bergeliat untuk sebagai upaya membangkitkan ekonomi kembali, karena pariwisata khususnya Dieng, merupakan penyangga destinasi prioritas Borobudur. Infrastruktur pendukung sangat penting, jalan dan akses menuju ke Dieng harus dilebarkan, sehingga para investor tertarik berinvestasi ke sini.
  - b. Terkait upaya untuk membangun jalan/akses ke dan dari Dieng melalui pengembangan jalan Tol maupun reaktivasi rel kereta api, Pemkab Wonosobo perlu memiliki masterplan pengembangan akses wilayah dan mengomunikasikan dengan pihak terkait, seperti Pemprov Jateng, Pemerintah Pusat, dan dengan Komisi V DPR-RI untuk mendapat dukungan.

- c. Ekonomi Kreatif harus memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri yang dapat memberikan ciri pembeda dengan daerah lain dan mengundang wisatawan untuk datang. Misalnya teh atau produk kreatif Wonosobo, harus memiliki ciri khas tersendiri.
- d. Dieng sudah mendunia, penanganannya harus lebih serius, diperlukan narasi (cerita, mitos) yang dapat mengundang wisatawan untuk datang dan membuktikan narasi-narasi tersebut.
- e. Anggaran pariwisata sebagai sektor strategis, perlu didukung oleh alokasi dana yang dianggarkan. Rata-rata anggaran untuk Dinas Pariwisata dalam APBD sangat kecil, sehingga dibutuhkan keseriusan Pemerintah Daerah, bukan hanya regulasi tetapi juga anggaran.
- f. Wilayah Wonosobo sebagai daerah wisata sebagian berada pada kewenangan lembaga lain atau memiliki aturan yang berbeda dengan aturan pariwisata. Hutan milik Perhutani, sementara bangunan budaya memiliki aturan UU Cagar Budaya. Untuk mengembangkan pariwisata sebaiknya dikaji perlunya dibentuk badan pengelola pariwisata sehingga tetap sesuai dengan UU Cagar Budaya. Pemkab Wonosobo juga perlu mengembangkan wisata religi.

### III. KESIMPULAN

1. Di Kabupaten Wonosobo terdapat 54 lokus pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersebar di lahan milik Pemda maupun Perhutani. Akibat adanya pandemi *Covid-19*, sekitar 843 usaha pariwisata, 400 pelaku di industri ekonomi kreatif dan 541 pelaku seni dan budaya masyarakat mengalami dampak yang sangat signifikan. Angka kunjungan wisatawan mengalami penurunan sebesar 57,2% pada tahun 2020, tahun 2019 wisatawan yang berkunjung sejumlah 1.670.140 orang, dan tahun 2020 wisatawan yang berkunjung sejumlah 808.193 orang.
2. Untuk mengatasi penyebaran pandemi *Covid-19*, Pemkab Wonosobo menyiapkan skema pengalihan anggaran belanja daerah sejumlah Rp.35,8 Milyar yang bersumber dari *refocusing* APBD 2020, APBDDesa, Donasi Masyarakat, BUMN, BUMD dan Dunia Usaha. Anggaran/kegiatan yang digunakan untuk penanganan *Covid-19*, antara lain:
  - a. Rp.12 Miliar untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak secara ekonomi.
  - b. Pemprov Jawa Tengah melalui program Dana Insentif Daerah memberikan bantuan pelaksanaan protokol kesehatan bidang pariwisata bagi 4 Desa Wisata di Kabupaten Wonosobo senilai masing-masing Rp20 Juta.
  - c. Anggaran APBD Kabupaten Wonosobo yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada tahun 2020 sejumlah Rp.394.000.000,- guna penanganan dampak *Covid-19* melalui fasilitasi bagi usaha pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif.
3. Selain penyediaan anggaran, untuk mengatasi penyebaran pandemi *Covid-19*, Pemkab Wonosobo, telah melakukan upaya antara lain:
  - a. bantuan sarana dan prasarana pendukung protokol kesehatan *Covid-19* yang berupa APD lengkap kepada 28 Desa Wisata, 7 Destinasi Wisata dan 30 Komunitas seni budaya;



- b. penyelenggaraan program Bantuan Tak Terduga (BTT) padat karya infrastruktur;
  - c. Program Jaring Pengaman Sosial (JPS), dalam bentuk paket bantuan bahan pokok (sembako) sejumlah 788 paket;
  - d. diadakan lomba foto peduli ekonomi kreatif terdampak *Covid-19*;
  - e. pelibatan organisasi pariwisata dan ekonomi kreatif, dan lain-lain.
4. Kabupaten Wonosobo telah memiliki komunitas pariwisata dan ekonomi kreatif, antara lain:
    - a. Komunitas *Oemah Wisata*, yang merupakan rumah bagi semua pelaku wisata di Wonosobo, dan terdiri dari 14 elemen pelaku pariwisata. Elemen tersebut antara lain mulai dari sopir, *guide*, dan sebagainya. Tujuannya adalah agar sama-sama bergandeng tangan bekerjasama dan mempunyai *taqline* “*maju bareng, mulyo Bareng*”.
    - b. Komunitas ekonomi kreatif “*mandala wisata*” yang terkoleksi di Galeri Gerbang Mandala Wisata, dan perlu keseriusan dan dukungan dari Pemerintah Pusat dalam pembinaan dan pengembangannya. Produk-produk Wonosobo perlu peningkatan kapasitas Ekonomi Kreatif.
  5. Kawasan Dieng sudah masuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sejak tahun 2019, sehingga mendapatkan DAK pariwisata sejak tahun tersebut. Gedung Syailendara di Dieng dibangun melalui DAK tahun 2019. Namun demikian, tahun 2022, Kawasan Dieng belum masuk *list* KSPN sehingga Pemerintah/Kemendparekraf RI perlu untuk memasukkan kembali Kawasan Dieng sebagai KSPN.
  6. Kabupaten Wonosobo berada di “Jantung Pulau Jawa”. Akses ke Wonosobo dari Semarang, Yogyakarta, Purwokerto, atau Surakarta, membutuhkan waktu yang relatif lama (jauh), sehingga sangat dibutuhkan jalan akses yang bisa mempersingkat waktu tempuh ke/dari Dieng. Akses tersebut bisa jalan tol dan sudah ada masterplan perencanaannya, seperti akses tol dari NYIA - Dieng dengan melewati beberapa daerah. Atau aktivasi kembali rel kereta api Purwokerto-Wonosobo.
  7. Salah satu yang dikembangkan di Dieng adalah wisata minat khusus, yaitu paralayang. Meskipun Dieng sudah dua kali menjadi tuan rumah *Trip of Indonesia*, namun masih terdapat kendala, antara lain:
    - wilayah sebagian besar milik Perhutani, sehingga diperlukan komunikasi dengan Perhutani untuk menggelar berbagai even paralayang.
    - kekurangan infrastruktur, khususnya jalur/akses, serta perlunya perbaikan tempat untuk *take off* paralayang.

#### IV. SARAN/REKOMENDASI

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah merekomendasikan kepada Pemerintah, Pemprov Jawa Tengah, maupun Pemkab Wonosobo, yaitu:

1. Memperbaiki infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Wonosobo sebagai penyangga kawasan wisata super-prioritas, terutama membangun akses langsung, baik berupa jalan tol atau reaktivasi rel kereta api, termasuk memperlebar akses jalan menuju ke dataran tinggi Dieng.

2. Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, perlu saling berkoordinasi untuk memperkuat pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Wonosobo, yaitu:
  - a. memasukkan kembali Dataran Tinggi Dieng sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) untuk tahun 2022.
  - b. mendukung pembinaan dan pengembangan pengembangan dan pembinaan wisata dan ekonomi kreatif bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang tergabung dalam komunitas “oemah wisata” maupun “mandala wisata”.
  - c. mendukung pengembangan wisata minat khusus paralayang, dengan perbaikan infrastruktur pendukung maupun koordinasi dengan Perhutani.
  - d. perlu mengkaji pembentukan badan pengelola pariwisata sehingga bangunan cagar budaya sebagai bagian dari wisata budaya tetap sesuai dengan UU Cagar Budaya.
3. Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu meningkatkan anggaran kepariwisataan dan ekonomi kreatif untuk mendukung Wonosobo sebagai daerah pariwisata penyangga kawasan wisata super-prioritas Borobudur.

## **V. PENUTUP**

Demikian laporan kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah sebagai bahan kajian dan landasan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut dalam rapat dengan mitra kerja Komisi X DPR RI.

Jakarta, 06 Juni 2021

**Ketua Tim,**

**Ttd.**

**Agustina W. Pramestuti, S.S. M.M.**  
**A-185**